

## PERILAKU POLITIK ELIT STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD RI PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN PANGKEP

M Amin<sup>1\*</sup>, Saifullah Bonto<sup>2</sup>, Nur Khaerah<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>123</sup>

\*E-mail: [m.amin@unismuh.ac.id](mailto:m.amin@unismuh.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the form of political behavior of Muhammadiyah structural elites in the selection of DPD RI members. This research method is a qualitative method that provides an objective picture of the actual state of the object being studied and the type of research used is the phenomenological type. The data used is the primary data source and secondary data source with the number of informants as many as 7 people. And documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal. The data usage used is source triangulation, triangulation technique and time triangulation. This research aims to find out position analysis, reputation analysis and analysis of decisions of Muhammadiyah structural elite Pangkep's regency. The results showed that the pattern of political behavior of Muhammadiyah structural elites in Pangkep Regency tends to be moderate-accommodating by being characterized by the participation of Muhammadiyah structural elites of Pangkep Regency in elections by choosing certain DPD RI Member Candidates without excessive fanaticism, then there is a willingness to cooperate and establish adaptive and rational relationships with prospective DPD RI Members without having to fuse themselves.*

**Keywords:** *Political Behavior, Elite, Muhammadiyah, DPD RI Members*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Anggota DPD RI, metode penelitian ini adalah metode kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Dan dokumentasi. Teknik Analisis data dan digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu. Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep cenderung moderat-akomodatif dengan ditandai oleh partisipasi para elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep dalam pemilu

dengan memilih Calon Anggota DPD RI tertentu tanpa adanya fanatisme yang berlebihan, Kemudian adanya kesediaan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan secara adaptif dan rasional dengan Calon Anggota DPD RI tanpa harus meleburkan diri.

**Kata Kunci:** Perilaku Politik, Elit, Muhammadiyah, Anggota DPD RI

## PENDAHULUAN

Kebangkitan identitas tidak hanya merupakan praktik perjuangan berbasis identitas kelompok atas dasar etnik, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya. Dalam hal ini, kebangkitan identitas dimaknai dalam bentuk kesadaran dan mobilisasi atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*) oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif (Sparringa, 2005).

Kebangkitan identitas juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses interaksi antaretnik. Perubahan identitas merupakan wujud kedinamisan budaya, karena pada prinsipnya kebudayaan bukanlah suatu yang statis, melainkan mengalami perubahan secara evolusioner. Identitas bukanlah sesuatu yang permanen, tetap dan tidak bisa berubah. Identitas menjadi hal yang terbuka untuk ditafsirkan kembali, diubah dan dimanfaatkan dalam proses social (Sotarauta et al., 2011).

Peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang identitas etnik dan agama (HR & Harakan, 2017). Kebangkitan identitas di era Reformasi dimaknai dengan munculnya identitas kedaerahan dan kesadaran politik baru untuk merestrukturisasi nilai-nilai kearifan lokal atas dasar primordial etnis dan agama. Dalam ranah sosial budaya, kebangkitan identitas tercermin dari upaya memasukan nilai-nilai keetnisan ke dalam peraturan daerah, pemekaran wilayah berbasis etnis dan perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus. Sementara dalam konteks keagamaan, kebangkitan identitas terefleksi dalam aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk munculannya “perda syariah”, maupun upaya

menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (van Klinken & Schulte Nordholt, 2007).

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik (Khaerah, Prianto, & Harakan, 2021).

Setiap warga negara harus memiliki kesadaran politik dan mampu memahami dunia politik dengan baik. Perilaku politik masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan sangat penting untuk mendukung proses kerja pemerintah dan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi didalam menjalankan pemerintahan. Hal ini karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat. Maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik (Mulyadi & Surbakti, 2010). Semenjak demokrasi menjadi kebutuhan wajib negara, maka keterwakilan menjadi suatu proses wajib untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga pemerintahan diharapkan mampu dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini membuat lembaga legislatif mendapat peranan penting dan posisi strategis karena hanya wakil rakyat yang memiliki kemampuan mengungkapkan kehendak rakyat.

UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang : (a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum disebut juga dengan *political market*. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi

untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilkannya dalam badan legislative maupun eksekutif (Samego, 2012).

Salah satu perwakilan rakyat di parlemen adalah Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat. Bagaimanapun aspirasi kedaerahan harus tetap menjadi perhatian apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri beberapa daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat. Intinya DPD diharapkan menjadi perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD.

Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia berkomitmen untuk lebih mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan diwujudkan secara nyata dalam masyarakat, dan belum pernah berubah menjadi organisasi politik atau partai politik. Namun Muhammadiyah bukan berarti anti politik, tetapi Muhammadiyah senantiasa turut serta mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia melalui peran politik yang dimainkan oleh para elit Pimpinan Muhammadiyah (Bosra, 2015).

Proses Pemilihan DPD sebagai manifestasi partisipasi politik menggunakan hak politik setiap warga dan elit Muhammadiyah, menimbulkan perilaku politik yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan efek antara kepentingan politik pribadi, warga dan elitnya. Kecenderungan menarik lembaga Muhammadiyah terjun langsung dalam politik atau tetap pada posisi sebagai gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut. Sebagaimana dikutip (Suwarno, 2019) bahwa, “Perilaku politik Muhammadiyah, baik secara personal maupun kelembagaan sering terjadi tarik-ulur. Di satu segi menunjukkan kecenderungan terjun langsung dalam politik praktis dan di lain pihak, ingin tetap menjalankan fungsinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar yang lebih kultural, bukan sebagai partai politik.”

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam merupakan suatu organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada pencerahan umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam gerakan dakwahnya Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai banyak wajah dalam arti netral, yang menunjukkan bahwa gerakan Islam modernis ini tidak dapat ditilik hanya dari satu sisi dengan satu wajah tetapi memerlukan pendekatan yang holistik (Shobron, 2010).

Persinggungan Muhammadiyah dengan politik dapat ditelusuri antara lain melalui Studi mengenai Muhammadiyah dan politik dengan mengambil fokus tentang perilaku politik elit Muhammadiyah, dengan pertimbangan bahwa: Pertama, Muhammadiyah melalui elit pimpinannya selama ini dikenal cukup luas serta banyak menempati posisi dan peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Posisi dan peranan yang besar dari Muhammadiyah dapat dicermati dari keberadaan organisasi Islam ini yang menurut Peacock telah menjadi sebuah pergerakan Islam yang terkuat di Asia Tenggara. Kedua, melalui penelitian sosiologis dapat dijelaskan bagaimana kenyataan sosial Muhammadiyah yang tercermin dalam perilaku para elitnya menunjukkan koherensi atau inkonsistensi antara citra ideal dan ide kebajikan dengan dunia nyata yang boleh jadi berjalan ke arah lain sebagaimana suatu kelaziman dalam kehidupan sosial.

Sebagai ormas Islam yang terbesar di Indonesia Struktural Muhammadiyah berada pada level nasional hingga kelurahan/desa. Khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dinaungi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pangkep. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep sangat berperan dalam mengawal dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam mengarahkan warganya untuk menentukan sebuah keputusan pilihan politik.

Terkait dengan perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep juga sangat berpengaruh terhadap sikap politik yang akan diambil oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep menunggu instruksi elit struktural Muhammadiyah. Hal inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku elit struktural politik Muhammadiyah dalam Pemilihan DPD RI khususnya di Kabupaten Pangkep.

Merujuk pada penelitian yang oleh berjudul Perilaku Politik dan Elit dengan hasil lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu dipengaruhi oleh partisipan politik yang memengaruhi cara pandang partisipan politik individu dalam menentukan pilihan politik. Adapun pada penelitian lainnya oleh (Sholikin, 2018), Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah dengan hasil Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil, selain itu juga bagaimana konstelasi kekuatan elit kolektif kolegal Muhammadiyah didominasi oleh para elit yang memiliki pandangan politik seperti apa.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dengan beberapa pendekatan. Mengacu pada kerangka teori model analisis elit (Putnam, 2001), yakni analisis posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan. Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku elit dan menjadi dasar dalam menentukan

tindakan politiknya. Sehingga pendekatan ini dapat menjelaskan perilaku politik elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini juga ada beberapa faktor yang menentukan yaitu partisipasi politik dan budaya politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 7 orang informan yang mempunyai kapabilitas sebagai elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep Metode ini digunakan karena informan dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Crowe et al., 2011), penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu, Reduksi, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan (Sugiono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep**

Dewan Perwakilan Daerah menjadi representatif setiap daerah Bersama DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di setiap daerah yang diwakilinya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2017. Oleh karenanya dalam Pemilu 2019 menjadi pucuk perjuangan untuk meloloskan orang yang dinilai mampu untuk mewakili masing-masing daerahnya. Organisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep yang turut menjadi bagian dari terlaksananya Pemilu 2019 ini, tidak terlepas dari berbagai dinamika khususnya dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel untuk mendukung Muhammad Syaiful Saleh menjadi senator DPD RI Periode 2019-2024.

Hasil rekapitulasi Pemilu 2019 untuk DPD RI Dapil Sulsel menyatakan Muhammad Syaiful Saleh belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota

DPD RI Periode 2019-2024 dikarenakan hasil perolehan suara yang didapatkan tidak cukup banyak. Khusus untuk Kabupaten Pangkep, Muhammad Syaiful Saleh hanya memperoleh sebanyak 9.062 suara. Tidak jauh berbeda dengan pesaingnya yang juga memperebutkan simpati warga Muhammadiyah yakni Muhammad Iqbal Parewangi dengan perolehan 7.013 suara. Perolehan suara terbanyak diduduki oleh Tamsil Linrung yang juga berhasil meraih kursi DPD RI Periode 2019-2024 dengan perolehan suara 56.982 suara di Kabupaten Pangkep. Berikut tabel hasil rekapitulasi Pemilu 2019 sesuai dengan yang termuat di website KPUD Kabupaten Pangkep :

	Nama Calon Anggota DPD	A M Iqbal Parewangi	Muhammad Syaiful Saleh	Tamsil Linrung
	Liukang Tangaya	247	184	352
	Liukang Kalmas	164	269	1.439
	Liukang Tangaya	334	638	828
	Pangkajene	1.294	1.757	10.558
	Balocci	231	904	2.998
	Bungoro	1.239	918	7.875
	Labakkang	1.197	929	8.184
	Marang	398	454	6.317
	Segeri	247	280	4.987
	Minasatene	1.109	1.158	6.299
	Mandalle	187	223	4.443
	Tondong Tallasa	186	1.178	1.474
	Liukang Tupabbiring Utara	180	170	1.228



	Jumlah Akhir	7.013	9.062	56.982
--	--------------	-------	-------	--------

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi pemilu 2019

Untuk menganalisis perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep, peneliti merujuk pada teori Nashir (2011) yang menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku politik moderat-akomodatif, kedua perilaku politik idealis dan yang terakhir perilaku politik pragmatis.

### **Perilaku Politik Moderat-Akomodatif**

Rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini berefek kepada perilaku politik bagi para pucuk pimpinan Muhammadiyah yang berada di level daerah masing-masing, baik di level Pimpinan Daerah Muhammadiyah maupun di level ortom-ortom setingkat daerah. Dikarenakan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini, maka para Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep harus ikut menyukseskan pemilihan Calon Anggota DPD RI dengan mendukung usungan yang sudah di sepakati oleh PWM Sulsel.

(Nashir, 2011) menjelaskan bahwa perilaku politik moderat-akomodatif merupakan sikap politik kompromistik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah, negara) tetapi tidak dengan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas pada kerjasama yang saling membutuhkan dengan tetap berpegang pada prinsip gerakan Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep selaku pimpinan tertinggi yang mengkoordinir segala aktivitas organisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep memberikann penjelasan mengenai pemilihan Calon Anggota DPD RI 2019. Penjelasan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep mengutarakan bahwa apa yang menjadi instruksi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel secara organisasi harus dilaksanakan dan sudah menjadi kewajiban anggota organisasi untuk menaati instruksi tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep mengintruksikan tanpa meminta pendapat atau mengakomodir terlebih dahulu pendapat para anggota organisasi yang lainnya. Sehingga keputusan yang muncul

adalah keputusan berdasarkan perintah organisasi yang setingkat di atasnya tanpa melibatkan organisasi setingkat di bawahnya.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah Pangkep saat peneliti mewawancarainya. Beliau menjelaskan bahwa dalam menentukan pilihan perlu ada pertimbangan terlebih dahulu. Calon Anggota DPD RI harus memiliki kualitas yang baik agar bisa dipilih sehingga pemilih yakin untuk memilihnya. Namun Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep tetap mengikuti hasil rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, menurutnya orang yang diusung oleh Muhammadiyah adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipilih.

Hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pangkep menyampaikan bahwa dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan Calon Anggota DPD RI yang lalu, beliau juga memiliki pertimbangan. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep menjelaskan bahwa dirinya tetap mengikuti instruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep sesuai yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Tapi menurut penjelasan beliau, dia juga tetap harus memperhatikan beberapa faktor sebelum menjatuhkan pilihannya secara final karena merasa memerlukan juga pandangan - pandangan dari internal organisasinya.

Namun kecenderungannya secara pribadi tetap mengikuti arahan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep dengan alasan memiliki ikatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan. Elit struktural Muhammadiyah memang menginnstruksikan semua elemen Muhammadiyah Pangkep baik warga maupun Pimpinan harus melaksanakan rekomedasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Organisasi Masyarakat seperti Muhammadiyah tentu memiliki kader yang potensial untuk ikut bertarung dalam ajang Pemilu 2019. Menanggapi hasil wawancara dari Badan Pengawas Pemilu Pangkep dan KPUD Pangkep peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan terlibatnya kader-kader Muhammadiyah

baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas, menunjukkan bahwa adanya moderasi dalam proses Pemilu 2019.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa perilaku politik yang ditunjukkan oleh masing-masing elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung kepada perilaku politik yang moderat dan mengakomodir pendapat-pendapat dari pihak lain tanpa memperlihatkan fanatisme yang berlebihan, terkecuali Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep yang cenderung mengambil keputusan satu komando dari pimpinan yang lebih tinggi dari struktural di atasnya sehingga tidak perlu lagi mengambil keputusan untuk bermusyawarah dengan pihak yang lainnya, baik organisasi otonom maupun anggota-anggota Muhammadiyah Pangkep yang lainnya. Kemudian Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pangkep yang memilih karena adanya kedekatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

### **Perilaku Politik Idealis**

Perilaku politik idealis yaitu perilaku politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal terhadap kekuasaan. Informan pertama memberikan komentarnya mengenai keterlibatannya dalam pemilihan DPD RI yang lalu.

Ketua Umum PD Muhammadiyah Pangkep mendukung total Calon Anggota DPD RI yang sudah direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Secara pribadi juga beliau tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung Calon DPD RI yang diusung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dikarenakan hubungan keakraban dengan calon Anggota DPD RI sebelumnya. Sehingga organisasi otonom Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep tentunya juga harus mendukung Calon Anggota DPD RI tidak ada independensi organisasi. Semua harus sesuai dengan intruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep menilai bahwa meskipun mengikuti dan melaksanakan hasil rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, terdapat batas-batasan tertentu dari Calon yang diusung dikarenakan tidak ingin diketahui oleh publik. Ketepatan putusan dari seorang Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah yang dinilai sesuai dengan visi dan misi untuk kemaslahatan orang banyak. Namun idealisme Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep cenderung kurang dikarenakan tidak ada sikap penolakan meskipun putusan yang sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan organisasi yang dipimpinnya. Visi dan misi Calon Anggota DPD RI harus sesuai dengan cita-cita organisasi menjadikan dijadikan bahan pertimbangan kepada internal organisasi sebagai keputusan bersama. Dalam pelaksanaan kampanye dengan memiliki hak tersendiri untuk menentukan Calon DPD RI yang diinginkan. Pelarangan organisasi dalam mendukung Anggota DPD RI tidak dibenarkan.

Menjadi kewajiban setiap individu untuk mempertimbangkan calon anggota DPD RI RI yang akan dipilih. Instruksi pimpinan Muhammadiyah sebagai keputusan yang diyakini terutama calon Anggota DPD RI tersebut merupakan warga Muhammadiyah. Pergerakan pimpinan Muhammadiyah cenderung di balik layar dengan mengarahkan untuk memilih calon yang telah direkomendasikan. Hal itu berbeda dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Pangkep yang menjadi bagian dari tim pemenangan. Kecenderungan elit Muhammadiyah pangkep untuk tidak terlibat secara praktis namun dalam keadaan dan waktu tertentu namun tetap mengkampanyekan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Dalam undang-undang tidak terdapat larangan apabila kader-kader Muhammadiyah baik ketua-ketua organisasi maupun anggotanya mengambil peran dalam Pemilu 2019 selama memenuhi persyaratan dan sesuai kaidah organisasi namun hal itu berbeda jika elit tersebut merupakan ASN.

Organisasi yang besar seperti Muhammadiyah Idealnya harus melibatkan kader-kadernya selagi memenuhi persyaratan untuk dicalonkan. Hal tersebut dapat

memudahkan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu sendiri apabila kadernya mendapatkan kedudukan yang legal.

Kecenderungan untuk bersikap idealis oleh masing-masing elit struktural Muhammadiyah Pangkep sangat minim dikarenakan masing-masing masih mengikuti instruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep. Tidak adanya sikap penolakan oleh masing-masing ketua organisasi menunjukkan bahwa mereka masih meyakini bahwa apa yang diinstruksikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep sudah tepat. Namun keputusan yang diambil tetap harus dikembalikan terlebih dahulu ke internal masing-masing organisasi agar keputusan yang lahir bukannya keputusan sepihak.

### **Perilaku Politik Pragmatis**

Perilaku Politik yang ketiga menurut Nashir (2011) yaitu perilaku politik pragmatis dimana perilaku yang ditunjukkan cenderung mengintegrasikan diri dalam kekuasaan dan meninggalkan label ideologi Muhammadiyah. Perilaku politik ini lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jika tidak ada manfaat untuk diri sendiri maka tidak ada keterlibatan dan biasanya orang yang pragmatis cenderung tidak memperhatikan independensi lembaga sehingga terjun langsung dalam proses politik.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyampaikan bahwa dirinya kadang ikut serta ketika Calon Anggota DPD RI melaksanakan kampanye karena memiliki kedekatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI tersebut. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah menjelaskan bahwa keterlibatannya secara langsung dalam Pemilu 2019 lalu tetap meleburkan diri tapi bukan sebagai aktor utama. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga tetap memperhatikan batasan-batasan yang dapat berefek kepada pekerjaannya melihat dirinya sebagai pegawai kontrak di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Pangkep.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep menjelaskan akan posisinya sebagai Ketua Yayasan sehingga tidak terlibat secara praktis dalam proses politik. Namun sebagai bentuk keta'atan terhadap rekomendasi Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Sulsel, beliau tetap menjalankannya meskipun harus bergerak di belakang layar. Perilaku yang ditunjukkan cenderung pragmatis dikarenakan terlibat langsung dalam proses pemilihan dengan alasan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara dan alasan yang paling kuat dikarenakan memiliki kedekatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI. Hal tersebut ditunjukkan oleh elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung berkampanye di balik layar dan tidak terlibat secara langsung namun dalam keadaan dan waktu tertentu tetap mengkampanyekan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Sebagai ketua ortom dan Warga Negara Indonesia dengan penuh kesadaran sudah sepatutnya untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2019. Tapi informan tersebut tidak berpartisipasi sebagai tim pemenang untuk Calon Anggota DPD RI yang diusung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemilih. Secara kelembagaan organisasi Muhammadiyah Pangkep beserta ortom-ortomnya tidak terlibat secara praktis. Namun keterlibatan Muhammadiyah terbatas pada kadernya saja yang mengatasnamakan pribadi itu pun bukan dari pimpinan tertinggi Muhammadiyah itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Perilaku politik elit-elit struktural Muhammadiyah pada saat Pemilu 2019 tidak ada sama sekali keterlibatan secara praktis namun kader-kader Muhammadiyah itu sendiri terlibat secara praktis. Bisa kita lihat dari hasil wawancara informan dari KPUD Pangkep yang menyatakan bahwa ada atas nama perseorangan yang berlatar belakang dari Muhammadiyah yang memasukkan berkas ke KPUD Pangkep. Kemudian yang kedua, adanya kader-kader Muhammadiyah yang berkonsultasi dengan Bawaslu Pangkep tentang batasan-batasan selama proses kampanye.

Pola perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep cenderung moderat-akomodatif dengan ditandai oleh partisipasi para elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep dalam pemilu dengan memilih

Calon Anggota DPD RI tertentu tanpa adanya fanatisme yang berlebihan, Kemudian adanya kesediaan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan secara adaptif dan rasional dengan Calon Anggota DPD RI tanpa harus meleburkan diri.

## REFERENSI

- Bosra, M. (2015). *Menapak jejak, menata langkah: sejarah gerakan dan biografi ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan*. Makassar: Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi.
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 1–9.
- HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Khaerah, N., Prianto, A. L., & Harakan, A. (2021). Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyyiatul Aisyiyah Sulsel*, 1(1), 45-50.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia.
- Nashir, H. (2011). *Muhammadiyah abad kedua*. Suara Muhammadiyah.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 41–51.
- Samego, I. (2012). POLITIK INDONESIA KONTEMPORER: DEMOKRATISASI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN. *THC*, 54.
- Shobron, S. (2010). Muhammadiyah dan strategi transformasi kader. *Jurnal-Tajdida Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 8(2).
- Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 3(2).
- Sotarauta, M., Ramstedt-Sen, T., Kaisa Seppänen, S., & Kosonen, K.-J. (2011). Local or digital buzz, global or national pipelines: patterns of knowledge

sourcing in intelligent machinery and digital content services in Finland.  
*European Planning Studies*, 19(7), 1305–1330.

- Sparringa, D. (2005). Multikulturalisme sebagai Respon Alternatif terhadap Politik Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: Sebuah Perspektif Sosiologi Politik. *Paper That Was Conveyed in a Course and Short Training about Human Rights and Democracy That Was Held by CESASS-UGM in Coordination with NCHR-Oslo University (Norway, Jogjakarta, 2005)*.
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*.
- Suwarno, S. (2019). Kelahiran Muhammadiyah Dari Perspektif Hermeneutik. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(1), 45–60.
- van Klinken, G., & Schulte Nordholt, H. (2007). *Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia*. Brill.